

NEWSPAPER

Masyarakat Terpaksa Naik Pompong, Dampak Dari Jembatan Ambruk

Asripilyadi - INDRAGIRIHULU.NEWSPAPER.CO.ID

Dec 8, 2021 - 20:17



Jembatan Penyebrangan Ambruk

Rengat, Riau - Ribuan masyarakat di sejumlah desa Kecamatan Batang Peranap, Indragiri Hulu tidak bisa menyebrang akibat jembatan ambruk. Oleh karena itu, berharap ada perhatian pemerintah sebelum ekonomi penduduk terpuruk dan menjadi terisolir.

Dampak lain adalah sulitnya mendistribusikan sembako, hasil pertanian dari pusat kota ke sejumlah desa. Ini terungkap setelah berdiskusi dengan salah satu warga Desa Pesajian Lis Sugiyarti (25), Rabu (8/12).

"Kami tentunya berharap jembatan itu segera dibangun, karena Jalur lalu lintas anak sekolah," katanya.

Puluhan anak sekolah setiap hari melalui jembatan penyebrangan itu. Pasca ambruk, terpaksa menggunakan pompong yang justru lebih berbahaya, dalam keadaan air terjadi pasang dan saat air surut pompong tidak bisa melalui sungai itu.

Sedangkan, Kepala Desa Pesajian Husni Tamrin juga menambahkan, aktivitas masyarakat setakat ini sangat terganggu. Ratusan warga harus antrian jika memanfaatkan pompong untuk penyebrangan ke pusat Kota Batang Peranap.

Akan tetapi, sebelumnya sudah ada utusan dari Dinas PUPR Inhu turun kelokasi meninjau kondisi jembatan. Saat itu, sejumlah warga sudah menyampaikan harapannya agar jembatan tersebut bisa dibangun kembali.

"Namun, utusan Dinas PUPR menyampaikan kalau mereka hanya menjalankan perintah dan tidak bisa memutuskan apakah segera dibangun atau menunggu," ujar Yusni.

Pada kesempatan lain, anggota Komisi III DPRD Inhu Chandra mengatakan, saat pembahasan APBD Inhu tahun anggaran 2022 tidak ada pembahasan soal pembangunan jembatan ambruk tersebut. Artinya, setelah RKH Dinas PUPR masuk untuk dibahas bersama DPRD.

"Jembatan ambruk justru setelah itu, Jadi kemungkinan pembangunannya masih perlu waktu," ucapnya.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Inhu, Bobby Mauliantino menjelaskan, pembangunan jembatan dan jalan yang menjadi harapan masyarakat adalah kewenangan pemerintah desa.

"Namun demikian, kami tetap mencarikan solusinya," janji Bobby. (Asri)